

RAPAT KONSULTASI PIMPINAN

Dua Jam Bahas Peningkatan Kinerja



RAPAT konsultasi pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) yang berlangsung di ruang sidang Deprov, kemarin (4/1).

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Fikram Sarankan Dilakukan Bergilir

PUNCAK BOTU -GP- Ketua Fraksi Golkar Deprov Gorontalo, Fikram Salilama, mengusulkan agar kegiatan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota Deprov dapat dilakukan secara bergilir. Ini perlu dilakukan mengantisipasi kekosongan kantor Deprov ketika kegiatan anggota Deprov menjalani agenda perjalanan dinas.



Fikram Salilama

"Saran saya sebaiknya bergilir. Jadi minggu ini dua komisi, nanti pada minggu berikutnya dua komisi yang lain," saran Fikram Salilama saat rapat konsultasi pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan AKD, kemarin.

Diengatakan, langkah yang sama juga perlu dilakukan oleh pimpinan DPRD. Jadi empat pimpinan DPRD dapat membagi jadwal kegiatan perjalanan dinas luar daerah. "Sehingga dalam setiap pekan pasti ada pimpinan DPRD yang stay," sarannya.

Menurut Fikram pengaturan ini penting agar fungsi DPRD berkaitan penyerapan aspirasi dari masyarakat bisa tetap berjalan walau di saat yang bersamaan Deprov sedang menjalani agenda perjalanan dinas. "Dengan begitu, setiap ada masyarakat yang akan datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya bisa bertemu langsung dengan anggota Deprov walau di hari yang sama ada agenda perjalanan dinas. Karena tak semua anggota Deprov melakukan perjalanan dinas," sarananya. (rmb)

2021, Fokus Pemulihan Ekonomi

PUNCAK BOTU -GP- Ketua Komisi II Deprov Gorontalo Espin Tuli mengharapkan agar program pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten-kota pada 2021 bisa difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Yang pada 2020 sangat terpukul akibat pandemi Covid-19.

"Memang sudah harus kesana. Harus fokus pada pemulihan ekonomi," jelasnya.

Dia mengatakan, saat penyusunan APBD Provinsi, pihaknya juga telah menekankan kepada pemerintah provinsi untuk bisa memberikan dukungan anggaran yang memadai terkait program pemulihan ekonomi masyarakat. "Dan ini menjadi salah satu konsentrasi DPRD dan Pemprov saat penyusunan APBD," jelasnya.

Menurutnya, Komisi II akan berupaya untuk mengawal program pemulihan ekonomi yang telah anggarkan dalam APBD induk 2021. Makanya Komisi II berencana untuk menggelar rapat kerja internal. Untuk menyusun agenda kerja yang salah satunya membahas soal pengawalan Komisi II terhadap program mitra kerja yang terkait dengan pemulihian ekonomi.

"Ya. Rencananya kita besok (hari ini, red) akan rapat kerja internal. Untuk membahas hal itu soal pengawalan Komisi II terhadap program pemulihian ekonomi yang sudah dianggarkan dalam APBD induk 2021," pungkasnya. (rmb)



Espin Tuli

saat penyusunan APBD Provinsi, pihaknya juga telah menekankan kepada pemerintah provinsi untuk bisa memberikan dukungan anggaran yang memadai terkait program pemulihian ekonomi masyarakat. "Dan ini menjadi salah satu konsentrasi DPRD dan Pemprov saat penyusunan APBD," jelasnya.

Menurutnya, Komisi II akan berupaya untuk mengawal program pemulihan ekonomi yang telah anggarkan dalam APBD induk 2021. Makanya Komisi II berencana untuk menggelar rapat kerja internal. Untuk menyusun agenda kerja yang salah satunya membahas soal pengawalan Komisi II terhadap program mitra kerja yang terkait dengan pemulihian ekonomi.

"Ya. Rencananya kita besok (hari ini, red) akan rapat kerja internal. Untuk membahas hal itu soal pengawalan Komisi II terhadap program pemulihian ekonomi yang sudah dianggarkan dalam APBD induk 2021," pungkasnya. (rmb)

tertera dalam undangan. "Misalnya rapat paripurna kita jadwalkan pukul 10.00 wita. Sebaiknya pada pukul 10.00 wita, pimpinan DPRD harus membuka rapat. Kalau peserta rapat belum quorum, rapat paripurna diskorsing. Dengan begitu, akan melatih kita semua untuk bisa tepat waktu menghadiri rapat," saran Ketua Fraksi Golkar, Fikram Salilama.

PUNCAK BOTU -GP- Ada keinginan dari internal Deprov Gorontalo untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021. Komitmen itu mencuat dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) yang berlangsung di ruang sidang Deprov Gorontalo, kemarin (4/1).

Ada 30 item yang berkaitan dengan teknis kerja pimpinan dan anggota DPRD yang dibicarakan dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam dari pukul 11.00-13.00 wita dan dipimpin langsung oleh Ketua Deprov Gorontalo Paris Jusuf itu.

Misalnya soal kedisiplinan pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri rapat kerja maupun rapat paripurna. Dalam rapat itu, para anggota Deprov menginginkan agar rapat harus dimulai tepat waktu sesuai waktu yang

tertentu.

"Jadi selain konsultasi, kita juga akan perkuat kegiatan sosialisasi perda masyarakat. Setiap anggota DPRD dijadwalkan untuk turun ke masyarakat mensosialisasikan perda yang sudah disahkan oleh Deprov Gorontalo," ujar Ketua Deprov Paris Jusuf. (rmb)

Batas Wilayah dan Tambang Pohuwato

Komisi I Desak Diseriusi Pemprov

PUNCAK BOTU -GP- Pemprov Gorontalo diharapkan untuk bisa menuntaskan dua persoalan yang rentan menimbulkan konflik sosial. Yaitu batas wilayah Gorontalo-Sulawesi Tengah (Sulteng) di kecamatan Tolinggula (Gorut) dan tambang rakyat di kabupaten Pohuwato.

Anggota Komisi I Adhan Dambea mengatakan, sangat disayangkan persoalan batas wilayah Gorontalo-Sulteng di kecamatan Tolinggula sampai sekarang ini belum juga tuntas. Padahal Komisi I sudah banyak kali membahas persoalan itu dalam rapat kerja yang melibatkan seluruh

pihak terkait. "Dan kita sudah memberikan rekomendasi ke Pemprov soal ini. Tapi kelihatannya Pemprov kurang serius menuntaskan persoalan ini. Padahal ini telah menjadi persoalan yang sudah cukup lama," tandasnya.

Adhan juga menyoroti

penyelesaian persoalan

tambang rakyat di

Kabupaten Pohuwato.

Saat rapat lintas komisi

yang menghadirkan unsur

Polda, Pemkab Pohuwato

dan seluruh pihak terkait

beberapa waktu lalu

telah merekomendasikan

agar Pemprov bisa

segera mengusulkan

agar tambang rakyat di

Pohuwato segera

diusulkan ke Kementerian

terkait menjadi wilayah

WPR. Karena semua

persyaratan terkait

pengurusan ijin WPR

sudah diurus oleh

Pemkab Pohuwato. "Tapi

sampai sekarang itu

jugा belum diusulkan.

Dengan alasan masih

menunggu daerah lain.

Padahal dalam rapat

yang menghadirkan

seluruh pihak terkait di

Deprov telah disepakati

bahwa WPR di Pohuwato

akan segera diusulkan,"

tandasnya.

Anggota Komisi I

Yuriko Kamara juga

mengharapkan agar

penyelesaian tapal batas

Gorontalo-Sulteng

yang belum clear. Batas

wilayah kabupaten-

kota yang menjadi

kewenangan provinsi

juga masih ada yang

belum clear. Misalnya

soal status kepemilikan

pulau Bitila.

"Atau juga batas

Kota Gorontalo-Bone

Bolango di Botupingge.

Letak kantor Deprov

dan Pemprov itu

sampai sekarang masih

diperebutkan oleh Kota

Gorontalo dan Bone

Bolango," jelasnya.

Ketua Komisi I AW Thalib mengemukakan, terkait tapal batas, sesungguhnya bukan hanya batas wilayah Gorontalo-Sulteng yang belum clear. Batas wilayah kabupaten-kota yang menjadi kewenangan provinsi juga masih ada yang belum clear.

Anggota Komisi I Kamara juga mengharapkan agar penyelesaian tapal batas Gorontalo-Sulteng di Tolinggula bisa segera diselesaikan. Karena ini telah menjadi persoalan lama yang belum juga tuntas sampai

hari ini. "Sudah satu tahun kami di Deprov masalah ini juga belum ada penyelesaiannya," tandasnya.

Ketua Komisi I AW Thalib mengemukakan, terkait tapal batas, sesungguhnya bukan hanya batas wilayah Gorontalo-Sulteng yang belum clear. Batas wilayah kabupaten-kota yang menjadi kewenangan provinsi juga masih ada yang belum clear.

Anggota Komisi I Yuriko Kamara juga mengharapkan agar penyelesaian tapal batas Gorontalo-Sulteng di Tolinggula bisa segera diselesaikan. Karena ini telah menjadi persoalan lama yang belum juga tuntas sampai

"Atau juga batas Kota Gorontalo-Bone Bolango di Botupingge. Letak kantor Deprov dan Pemprov itu sampai sekarang masih diperebutkan oleh Kota Gorontalo dan Bone Bolango," jelasnya.

Terkait hal itu, dalam rapat internal Komisi I kemarin diputuskan dua persoalan ini, kembali akan diseriusi oleh Komisi I. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu menjadwalkan rapat kerja yang nanti akan menghadirkan seluruh pihak terkait.

"Atau batas wilayah Kabgor-Kota Gorontalo di danau Limboto. Itu sampai sekarang belum jelas. Meski perda tentang zonasi danau Limboto sudah ada," tandasnya.



RAPAT internal Komisi I Deprov Gorontalo kemarin (4/1) membahas rencana kerja Komisi.

Vaksin Covid-19
La Ode Minta Perkuat Sosialisasi

La Ode Haimudin

sosialisasi harus lebih dikenalkan lagi," tandasnya. Terkait pemberian vaksin Covid-19, La Ode mengatakan, masyarakat sesungguhnya tidak perlu ragu dan takut. Karena pemberian vaksin ini merupakan program Covid-19 ini akan berjalan dengan baik. Karena pemerintah telah mengatur secara bertahap. "Jadi ada kelompok-kelompok awal yang akan divaksin. Jadi saya yakin ini tidak akan banyak menemui masalah di lapangan," pungkasnya. (rmb)

Senin, Aleg Wajib Pakai Karawo

PUNCAK BOTU -GP-

Salah satu komitmen yang tercusus dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) kemarin yaitu soal berpakaian. Untuk mendukung penguatan branding karawo sebagai kerajinan khas Gorontalo,

pimpinan dan anggota Deprov diwajibkan untuk memakai karawo pada setiap hari Senin.

"Jadi setiap Senin, kita akan menggunakan karawo saat bertugas," ujar Ketua Deprov Paris Jusuf dalam rapat itu.

Selain hari Senin, keharusan bagi anggota Deprov menggunakan kain karawo yaitu saat melakukan perjalanan dinas luar daerah.

"Jadi ini sebagai bentuk dukungan Deprov untuk memperkenalkan secara lebih luas karawo sebagai salah satu kerajinan khas ungulan Gorontalo," pungkasnya. (rmb)